



SELAS, 18 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kerugian Negara Capai Ratusan Miliar

Pemprov Berupaya Kembalikan

RBI, BENGKULU - Dalam deadline akhir tahun 2018, Pemda Provinsi Bengkulu berupaya untuk mengembalikan kerugian negara ditahun sebelumnya. Dengan dilantiknya Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Provinsi Bengkulu Tahun 2018, agar dapat menargetkan pencapaian pembayaran kerugian tersebut. Disampaikan oleh Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Massa Siahaan kerugian

negara pada tahun ini dapat diselesaikan. Dalam penyelesaian tersebut, ada beberapa pemisahan kategori dikarenakan kerugian negara ada disebabkan karena sudah lama yang disebabkan ASN yang sudah meninggal dunia. Namun, jika yang masih tercatat aktif maka kerugian negara tersebut secepatnya akan ditagih. "Kita baru melantik majelis TPTGR, kebanyakan disana areanya. Mudah mudahan kalau sudah ada sidang, beberapa kasus yang

sudah diselesaikan oleh ASN kita harapkan melewati dengan majelis tersebut. Maka kita harapkan para majelis tersebut dapat menyelesaikan target tersebut. Dikarenakan kita harus pisahkan, mana yang ASN yang sudah meninggal, sudah pindah atau bagaimana yang masih tercatat. Namun yang masih aktif ini kita akan tagih," terangnya kemarin. Kewewenangan TPTGR berupaya untuk mengembalikan kerugian negara, jika pelaku kerugian negara

dinyatakan meninggal dunia maka dapat dihentikan. Namun harus melewati mekanisme aturan hukum yang ada, nantinya Majelis mengusulkan perihal tersebut ke BPK. Dengan acuan temuan yang tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang sah. "Yang tidak aktif ini atau sudah meninggal akan kita usulkan ke BPK dengan status temuan yang tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang sah. Dihentikan, namun dilewati oleh Majelis dahulu, nanti

ada sidang setelah itu dibawa berita acaranya," pungkasnya. Diketahui selama periode tahun 2014 sampai 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu mencatat ada 7.915 rekomendasi yang dikeluarkan untuk pemerindah daerah (pemda) dengan total temuan Rp 619 miliar. Dari total potensi kerugian negara itu, Rp 315 miliar sudah ditindaklanjuti. Sedangkan Rp 304 miliar lagi hingga saat ini masih dalam proses pengembalian. (bro)